
Juli 2022

Indonesia: Kredibilitas Anggaran dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

By: Dede Krishnadianty, Budget Credibility
Program Officer



**International
Budget
Partnership**

Daftar Isi

1. Latar belakang, Tujuan serta temuan Studi Singkat (Brief)	04
2. Proses penyelarasan SDGs kedalam Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah	05
3. Latar Belakang Kredibilitas Anggaran di Indonesia	08
4. Tampilan Data dan proses klasifikasi Anggaran berdasarkan tujuh sektor terkait SDGS	09
5. Diskusi terkait dampak Pandemi Covid 19 terhadap SDGs dan penganggaran pemerintah	12
6. Diskusi Gender didalam anggaran pemerintah	15
7. Analisa keterbatasan data yang disajikan dalam brief	16
8. Kesimpulan dan Rekomendasi	18
9. Daftar Pustaka	19
10. Lampiran	21

Daftar Singkatan

APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

DAU: Dana Alokasi Umum

DAK: Dana Alokasi Khusus

SDGS: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

RAN SDGS: Rencana Aksi Nasional SDGS

RAD SDGS: Rencana Aksi Daerah SDGS

PUG: Pengarus utamaan gender

BPK: Badan Pemeriksa Keuangan

IBP: International Budget Partnership

JICA: Japan International Cooperation Agency

KSI: Knowledge Sector Initiatives

PUG: Pengarus utamaan gender

SDGs: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

UNDP: United Nations Development Program

VNR: Voluntarily National Review

1. Latar belakang, Tujuan serta temuan Studi Singkat (Brief)

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk memenuhi target SDGS di tahun 2030 dengan mengeluarkan Perpres No. 59/2017 tentang SDGS. Penyelarasan target SDGS ke dalam program pembangunan dilakukan dengan penyusunan rencana aksi di tingkat nasional dan daerah. Diperlukan mekanisme untuk menerjemahkan rencana rencana aksi ini ke dalam program dan kegiatan pembangunan agar memiliki dampak yang signifikan terhadap percepatan pencapaian SDGS.

Banyak negara yang menghadapi tantangan isu kredibilitas anggaran, yaitu kemampuan untuk dapat menggunakan anggaran sesuai dengan perencanaan. Hal ini juga menjadi target SDGS dalam indikator 16.6.1, dimana kredibilitas anggaran bertujuan untuk membandingkan perencanaan dan realisasi anggaran pemerintah. Performa realisasi anggaran pemerintah Indonesia pada kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cukup baik dengan tingkat realisasi sebesar 93% (2017), 100% (2018), 92% (2019), dan 93% (2020).¹ Namun jika dilihat secara agregat, terlihat adanya underspending dan overspending yang bervariasi pada eksekusi anggaran di tujuh sektor yang berkontribusi pada pencapaian SDGs.

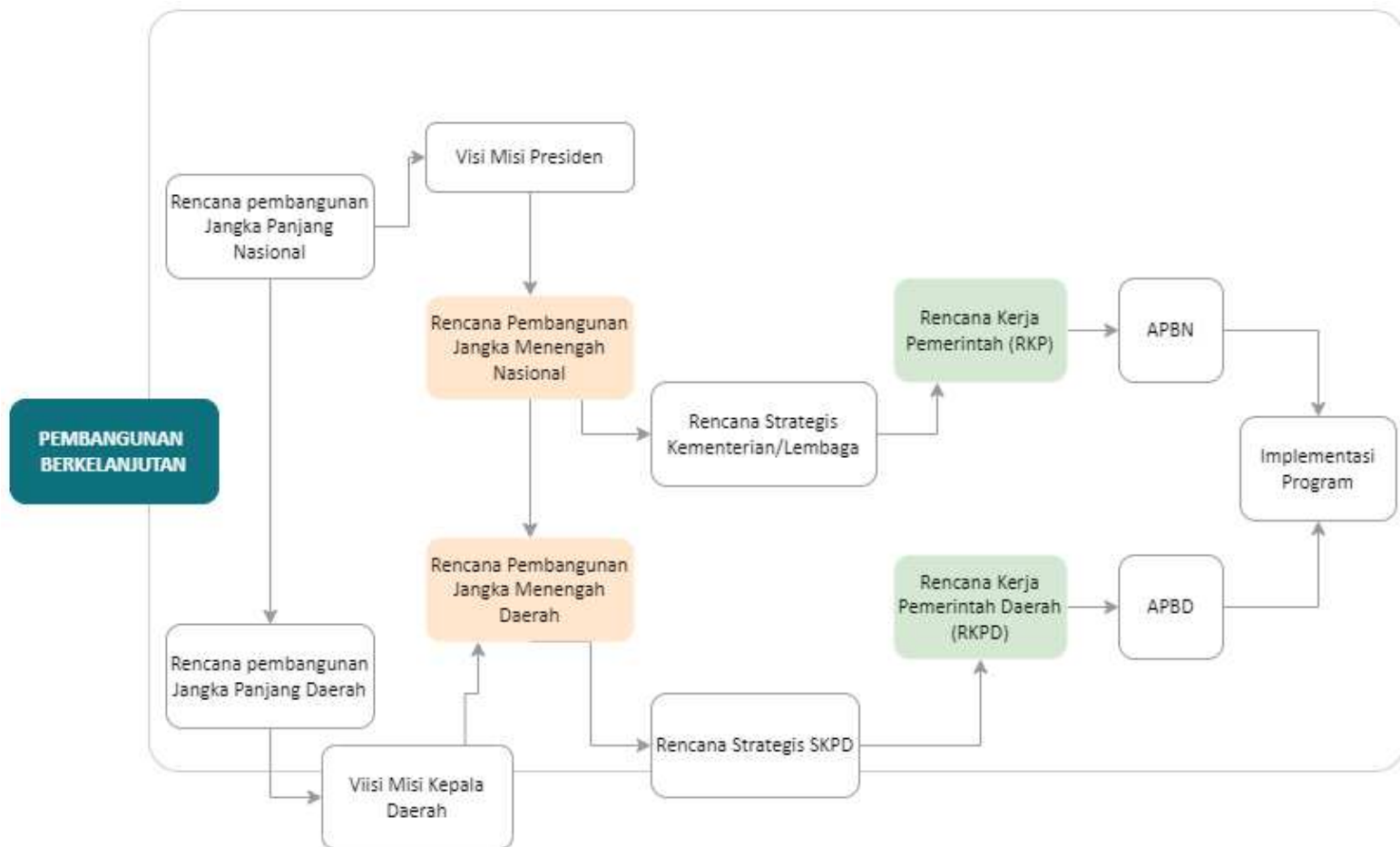
Studi singkat ini bertujuan untuk melihat kredibilitas anggaran dalam pencapaian SDGs di Indonesia di tujuh sektor SDGs, yaitu (1) Pertanian dan Makanan, (2) Pendidikan, (3) Lingkungan Hidup, (4) Kesenjangan Gender, (5) Perlindungan sosial, (6) Kesehatan, dan (7) Air Bersih dan Sanitasi. Selain itu, studi ini berupaya melihat kesesuaian rencana dan realisasi anggaran pemerintah pusat untuk periode tahun anggaran 2017-2020. Studi ini mencoba membandingkan tren anggaran terhadap status kemajuan pencapaian SDGs di Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan indeks pembangunan berkelanjutan.²

¹ Presentase realisasi anggaran belanja Pemerintah pusat

² Sumber: <https://dashboards.sdindex.org/profiles/indonesia>

2. Proses penyelarasan SDGs kedalam Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah

Pelaksanaan pencapaian SDGs diamanatkan dalam Perpres No. 59/2017 yang mewajibkan penyusunan 3 tiga dokumen perencanaan SDGs Indonesia yaitu: Peta Jalan SDGs, Rencana Aksi Nasional SDGs, dan Rencana Aksi Daerah SDGs Provinsi. SDGs telah diselaraskan dengan beberapa dokumen perencanaan Indonesia, diantaranya RPJMN 2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 (Buku RAN SDGs, 2017; VNR, 2019). Tidak ada informasi yang jelas terkait bagaimana dokumen ini diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan anggaran pemerintah. Saat ini program kegiatan SDGs dalam perencanaan kerja pemerintah tidak memiliki kodefikasi anggaran dan data disaggregate khusus SDGs. Oleh karena itu dibutuhkan penandaan (tagging) detail di level komponen input di pemerintah daerah dan level program output di kementerian/Lembaga untuk mendapatkan gambaran adanya isu kredibilitas anggaran secara detail.



Gambar 1: Alur penyelarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam Dokumen perencanaan Pembangunan

Laporan audit BPK RI dalam proses audit perencanaan SDGs Indonesia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki cukup persiapan dalam penyajian data untuk monitoring evaluasi. Namun penyajian data di level pemerintah daerah perlu diperbaiki (BPK, 2018). Tantangan lain yang dihadapi dalam proses integrasi pusat ke daerah adalah lemahnya koordinasi antar kementerian, ketepatan pengukuran dan penggunaan indikator, serta belum maksimal adopsi SDGs di level pemerintah daerah yang disebabkan perbedaan prioritas pembangunan di tingkat lokal dan pergantian kepala daerah (politik).

Selain APBN, sumber-sumber pendanaan pemerintah untuk membiayai SDGs adalah: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Dana Alokasi Umum(DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.³ Sumber-sumber yang tidak mengikat ini termasuk bantuan internasional, Corporate Social Responsibility (CSR) dan donasi masyarakat. Bantuan Internasional diantaranya dari:

- United Nations Children's Fund (UNICEF) yang membantu proses pembentukan SDGs Dashboard⁴
- Asian Development Bank (ADB) mendukung pembuatan peta jalan SDGs Indonesia 2030.
- Japan International Cooperation Agency (JICA) membantu pengembangan SDGs E-Monev.
- German Development Agency (GIZ) membantu perumusan e-monev.
- United Nations Development Fund (UNDP) dan Australia's Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) untuk mendukung Sekretariat SDGs.

Pendanaan non pemerintah yang tidak mengikat atau bantuan masyarakat tidak tercatat dalam dokumen keuangan negara sehingga sulit mendapatkan informasi detail anggaran terkait hal ini. Bappenas pada konferensi tahunan SDGs menyebutkan adanya kebutuhan pendanaan SDGs di periode 2020-2024 sebanyak Rp 67 ribu triliun dengan selisih pendanaan sekitar Rp14 ribu triliun. Bappenas tidak menjelaskan dasar perhitungan kebutuhan anggaran tersebut. Hal yang pasti adalah, kondisi pandemi menyebabkan kenaikan kebutuhan pendanaan SDGs sebesar 70 persen.⁵ ⁶ BPK RI (2018)⁷ juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah berhasil mengidentifikasi kebutuhan pendanaan dan sumbernya SDGs. Namun diperlukan regulasi khusus terkait anggaran untuk SDGs, dalam hal ini rekomendasi yang diberikan adalah perlunya kerjasama antara BAPPENAS dan Kemenkeu untuk menetapkan aturan presiden terkait Kualitas anggaran dan belanja SDGs.

Pada SDGs Annual Conference tahun 2019, Bappenas menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk SDGs Financing Hub sebagai unit dalam Bappenas yang berfungsi sebagai pusat koordinasi pembiayaan SDGs.⁸ Namun tidak ditemukan informasi berupa website atau aktivitas dari SDGs financing Hub. Strategi inovasi pendanaan SDGs lainnya adalah dengan melibatkan legislatif dalam proses pengesahan anggaran SDGs dan peluncuran SDGs Indonesia ONE oleh Kementerian Keuangan, sebuah Platform pendanaan SDGs yang terintegrasi, SDGs ONE telah mengumpulkan komitmen pendanaan sebesar Rp 34,5 triliun.⁹ Efektivitas dari inovasi ini belum diketahui karena belum ada studi yang mendalam dan tidak terdapatnya laporan terkait hal ini yang bersifat publik.

Indonesia telah mencatat keberhasilan pencapaian SDGs dalam VNR 2019 dimana 27 provinsi telah memiliki RAD SDGs di tahun 2020. Sebelas provinsi diantaranya telah menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi (monev) RAD SDGs. Namun pembahasan mengenai anggaran yang telah terpakai maupun sumbernya tidak dapat diketemukan baik dalam laporan SDGs 2019 maupun laporan VNR.

³ Perpres 59/2017 tentang SDGs

⁴ Sumber: <http://TPB.bappenas.go.id/dashboard/>

⁵ Sumber: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/448875/bappenas-sebut-kebutuhan-pendanaan-untuk-TPB-mencapai-rp67-ribu-triliun>

⁶ Sumber: <https://adv.kompas.id/baca/sinergi-pendanaan-inklusif-untuk-pencapaian-TPB/>

⁷ Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). PERFORMANCE AUDIT REPORT OF THE PREPAREDNESS FOR IMPLEMENTATION OF TPB IN INDONESIA. BPK RI.

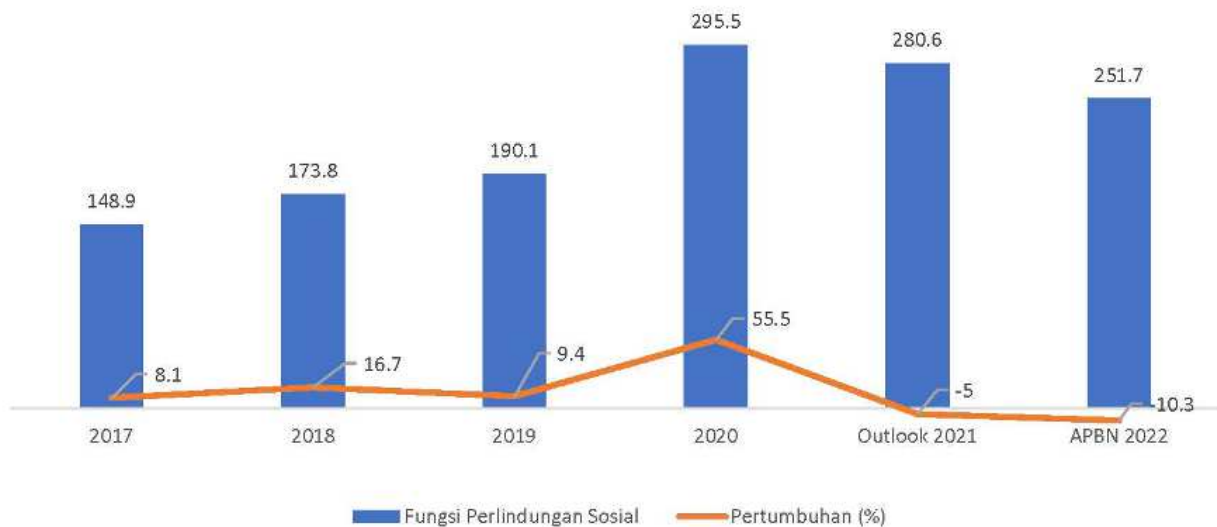
⁸ Sumber: <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/nN9wYM9k-bappenas-bentuk-TPB-financing-hub>

⁹ Sumber: kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-luncurkan-sdg-indonesia-one-kemenkeu-dukung-pencapaian-sustainable-development-goals-di-indonesia/

Terdapat bab khusus dalam VNR terkait potensi pembiayaan SDGs namun tidak disebutkan sumber dan jumlah potensi pembiayaan. VNR 2019 memasukan adanya laporan budget credibility (kredibilitas anggaran) indikator 16.6.1, dengan pendanaan pemerintah sebagai proporsi pendanaan yang disetujui (tabel 8, hal. 162) bersamaan dengan narasi yang menjelaskan tren kredibilitas anggaran dalam tahun yang dilaporkan (2014-2017) serta keterangan bahwa pemerintah telah menerapkan reformasi kebijakan keuangan publik tentang aset dan pengadaan barang jasa.

BPK RI telah melakukan review Dokumen VNR 2021 dan menyusun tiga kerangka kriteria penilaian Dokumen VNR yaitu (1) menilai kesesuaian data, (2) konsistensi laporan VNR 2017 dan VNR 2019 dengan VNR 2021 dan (3) validasi dan Analisa VNR 2021 dengan hasil audit BPK, namun kriteria ini tidak memasukan aspek penilaian penggunaan pendanaan SDGs. Seperti halnya laporan tahun 2019, VNR 2021 menyajikan table yang menyajikan tren kredibilitas anggaran periode tahun 2014-2020 untuk indikator 16.6.1, yang menyajikan anggaran pemerintah sebagai proporsi anggaran yang disetujui (tabel 4.9, hal 245). Dokumen ini juga memasukan data tambahan dari kementerian/Lembaga yang menerima status tidak sesuai dalam laporan audit dan skor dalam sistem performa akuntabilitas pemerintah.¹¹

Pemerintah Indonesia memiliki target untuk mengentaskan kemiskinan di tahun 2024 atau 6 tahun lebih awal dari masa akhir SDGs di tahun 2030.¹² Hal ini disebutkan dalam laporan VNR 2017 dimana 7 dari 17 tujuan (Tujuan 1, 2, 3, 5, 9, 14 dan 17) didiskusikan karena ketujuh tujuan ini saling berkaitan dan berkontribusi ke tujuan no 1: Pengentasan kemiskinan (VNR 2017).



Gambar 2: Tren anggaran pemerintah di fungsi perlindungan sosial periode tahun 2017-2022 (Milyar rupiah), sumber: Kementerian Keuangan: Nota Keuangan RAPBN 2022

Seperti terlihat dalam Gambar 2, angka pertumbuhan anggaran fungsi perlindungan sosial rata-rata adalah 26 persen pertahun (Kementerian Keuangan, 2021). Peningkatan alokasi anggaran pada kurun 2017-2020 ini berkorelasi positif dengan turunnya angka kemiskinan periode 10 tahun terakhir dari angka 18 persen (2006) menjadi 11 persen (2016). Data World Bank menunjukkan adanya perkembangan secara progressif sampai dengan tahun 2019. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi kesenjangan ekonomi dan ketimpangan (inequal growth) antara perdesaan dan perkotaan.

¹⁰ Sumber: VNR 2021, Hal 13

¹¹ Catatan bahwa data yang dilaporkan untuk deviasi anggaran dalam laporan pemerintah di VNR tidak sama dengan data yang disajikan dalam brief ini. Data yang disajikan dalam brief ini berasal dari Data anggaran pemerintah resmi yang menunjukkan total anggaran setiap tahun anggaran (termasuk semua jenis anggaran). Sumber data dalam VNR tidak dijelaskan sumbernya; di laporan VNR selanjutnya, akan sangat bermanfaat untuk menyebutkan sumber dan dasar dari proses perhitungan sehingga dapat bermanfaat untuk para peneliti dan masyarakat.

¹² Program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (<https://pip.kemdikbud.go.id/home>), subsidi listrik, BBM subsidi dan Bantuan Langsung Tunai adalah program-program yang dicanangkan pemerintah untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut.

3. Latar Belakang Kredibilitas Anggaran di Indonesia

Tren anggaran pemerintah dalam empat tahun terakhir memperlihatkan bahwa performa penyerapan anggaran di tingkat agregat cukup baik dengan serapan anggaran sekitar 93 persen (2017), 100 persen (2018), 92 persen (2019), dan 93 persen (2020).¹³ Studi dari Knowledge Sector Initiatives (KSI) [ST1] [DK2] menyatakan beberapa masalah utama dalam sistem perencanaan dan anggaran di Indonesia, yaitu diskoneksi antara proses perencanaan dan penganggaran, tidak selarasnya perencanaan pembangunan pusat dan daerah, serta minimnya bukti verifikasi persetujuan program dan anggaran.¹⁴ Selain itu, Seknas Fitra (2013), sebuah lembaga non pemerintah dalam briefnya menyebutkan terdapat disintegrasi dalam aplikasi sistem informasi perencanaan penganggaran, dimana lembaga pemerintah terkait tidak mempublikasikan alasan dibalik perubahan anggaran. Selain itu tidak diketahui dampak terhadap indikator capaian, apakah terdapat penyesuaian atau tidak. Hal ini menunjukkan adanya masalah akuntabilitas dalam sistem perencanaan dan penganggaran keuangan negara.

Proses perubahan anggaran diatur oleh PP No 45 tahun 2013 tentang tatacara pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara, memberikan diskresi kepada unit organisasi untuk melakukan pergeseran anggaran dalam unit organisasi tersebut. Sesuai dengan pasal 38 PP tersebut, pergeseran anggaran dapat dilakukan karena beberapa faktor: alasan administratif; alasan alokatif; perubahan rencana penarikan dana; dan/atau perubahan rencana penerimaan dana. Pemerintah perlu mengajukan perubahan anggaran tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Laporan kinerja pemerintah menitikberatkan pada deskripsi pencapaian kinerja dan memaksimalkan serapan anggaran, dikarenakan belum terintegrasinya laporan keuangan pemerintah dengan laporan kinerja, tidak ada penjelasan terkait hubungan antara output (dampak) dan realisasi anggaran dalam laporan keuangan. Tantangan terbesar dalam isu kredibilitas lainnya adalah rendahnya serapan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tingkat daerah (Putri, 2021; James Sinaga, 2016).¹⁵

Pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan informasi keuangan daerah (IKD) kepada Kementerian Keuangan¹⁶ dan membuat LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang dapat diakses oleh publik. Desentralisasi mengakibatkan peningkatan anggaran dari pemerintah untuk daerah sekitar 50 persen, karena terbatasnya sumber pendanaan sendiri pemerintah daerah. Studi PEFA (2020) menyatakan 85 persen dari anggaran belanja daerah tergantung dari Dana transfer dari pusat. Tidak terdapat informasi mengenai kontribusi anggaran daerah untuk pencapaian SDGS dikarenakan mekanisme pelaporan anggaran tidak memuat detail disagregat per sektor. Realisasi anggaran pemerintah daerah dalam tiga tahun terakhir rata-rata hampir 59 persen digunakan untuk belanja pegawai. Hal ini menunjukkan anggaran pemerintah daerah belum efektif digunakan untuk pembangunan.¹⁷

¹³ Angka ini adalah persentase realisasi anggaran pemerintah pusat

¹⁴ Sumber: <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/03/ksi-1585487219.pdf>

Retrieved from news article: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211123153210-4-293779/sri-mulyani-sentil-kepala-daerah-uang-rakyat-malah-ditahan>

¹⁶ Hal ini diatur oleh Peraturan Kementerian Keuangan no 07/2020, diakses mealui: https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/231_PMK.07_2020Per-1.pdf

¹⁷ Sumber diakses melalui: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4656969/59-persen-dari-anggaran-daerah-habis-untuk-bayar-gaji-pns>

4. Tampilan Data dan proses klasifikasi Anggaran berdasarkan tujuh sektor terkait SDGS

Seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah ini, performa anggaran tujuh sektor SDGS secara umum menunjukkan underspending sebesar 10 persen dan overspending sampai dengan 12 persen. Tiga sektor yang memiliki deviasi rerata underspending cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir adalah sektor Pertanian dan makanan (-10 persen), sektor air bersih dan sanitasi (-7 persen) dan sektor kesetaraan gender (-5%).

Proporsi anggaran setiap sektor terhadap total anggaran pemerintah menunjukkan fokus pada sektor Air Bersih dan Sanitasi (7 persen) dari total anggaran pemerintah pusat. Situasi Pandemi menyebabkan adanya peningkatan anggaran secara signifikan di tahun 2020 pada kementerian tertentu, seperti BNPB (sektor lingkungan hidup), kementerian sosial (sektor perlindungan sosial), kementerian Kesehatan (sektor kesehatan) dan Kementerian Koperasi dan usaha kecil menengah (sektor Kesetaraan gender). Hal ini dikarenakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memfokuskan pada upaya pengurangan kemiskinan dan pengadaan vaksin Covid 19. Meskipun BNPB berkontribusi dalam sektor lingkungan hidup sesuai dengan Perpres No. 59/2017, proses kenaikan anggaran sebesar 2054 persen lebih kepada perannya sebagai ketua satgas PEN.

<u>Sector</u>	<u>Tujuan SDGs yang terkait</u>	<u>SDGs Indeks Performa</u>	<u>SDGs Indeks Tren</u>	<u>Alokasi dari Total pembelanjaan (Rata Rata)</u>	<u>Deviasi Anggaran (Rata rata)</u>
Agriculture and Food	Tujuan 2: Tanpa Kelaparan	Tantangan yang besar masih ada	cukup membaik	2%	-10%
Education	Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas	Tantangan masih ada	Sesuai target atau mempertahankan capaian SDGs	5%	-1%
Environment	Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim	Tantangan masih ada	Tidak ada perubahan	1%	12%
	Tujuan 14: Ekosistem lautan	Tantangan yang besar masih ada	Tidak ada perubahan		
	Tujuan 15: Ekosistem Daratan	Tantangan yang besar masih ada	Tidak ada perubahan		
Gender	Tujuan 5: Kesetaraan Gender	Tantangan yang signifikan masih ada	cukup membaik	0,5%	-5%
Health	Tujuan 3: Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera	Tantangan yang besar masih ada	cukup membaik	5%	1%

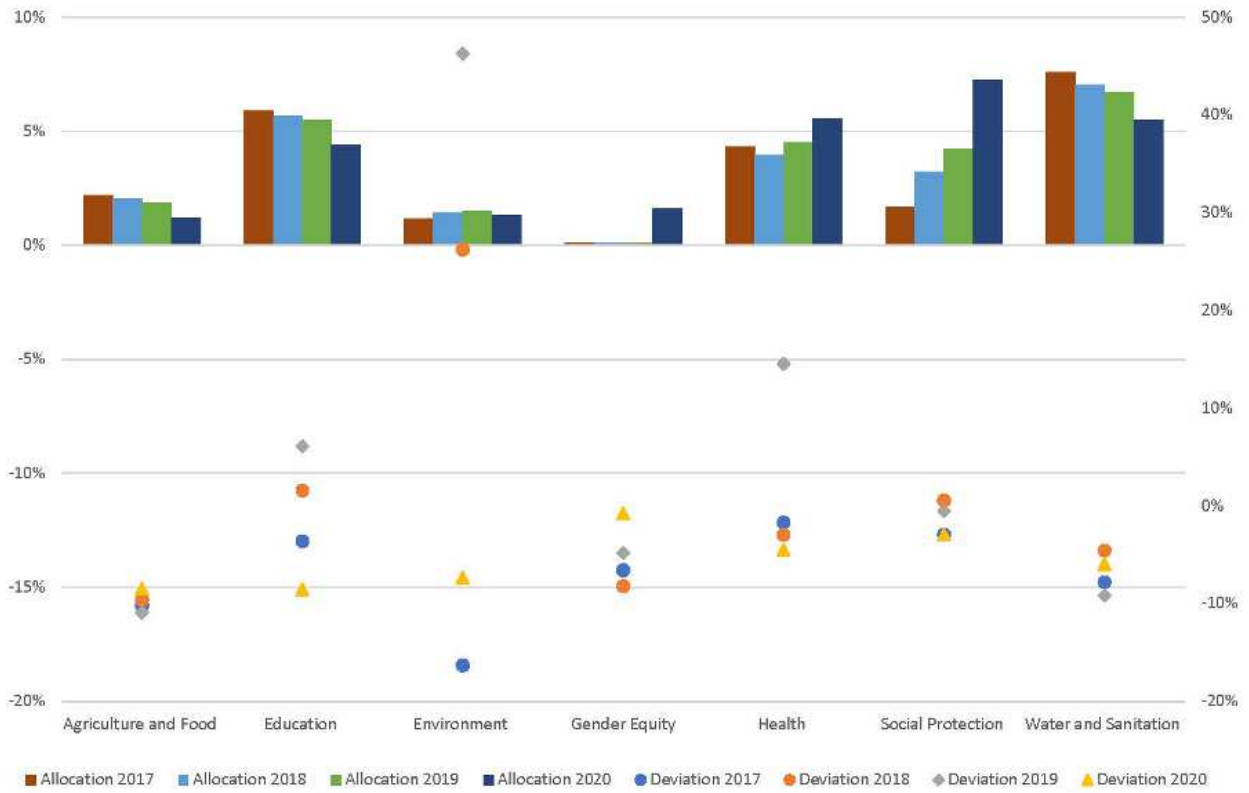
Social Protection	Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan	Tantangan yang signifikan masih ada	cukup membaik	4%	-1%
	Tujuan 10: berkurangnya kesenjangan	Tantangan yang besar masih ada	cukup membaik		
Water and Sanitation	Tujuan 6: Air bersih dan Sanitasi	Tantangan yang besar masih ada	Informasi tren tidak tersedia	7%	-7%
Total central government budget					-6%

Tabel 1: SDGS berdasarkan tujuh sector dan tren rerata kredibilitas anggaran serta proporsi terhadap anggaran total pemerintah

Melihat tren anggaran pada kurun waktu 2017-2019 terlihat bahwa tidak ada pola konsisten antara alokasi anggaran dengan upaya menaikkan indeks kinerja SDGs Sebagai contoh sektor kesetaraan gender, dengan indeks kinerja masih memiliki "tantangan yang cukup signifikan" (significance challenge remain), namun porsi anggaran sektor ini terhadap total anggaran pemerintah pusat sangat kecil yaitu sebesar 0,1 persen. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 2 persen, karena kenaikan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sebesar 3000 persen. Underpending terjadi selama periode empat tahun antara 1-8 persen. Sektor 3. Lingkungan Hidup memiliki deviasi yang cukup tinggi, yakni underspending 16 persen (2017), overspending 26 persen dan 46 persen di tahun 2018 dan 2019, dan di tahun 2020 underspending 7 persen dengan SDGs indeks trend stagnan.

Diperlukan studi anggaran lebih lanjut untuk melihat korelasi kredibilitas anggaran dan dampaknya pada pencapaian indikator SDGs, serta tren indeks kinerja SDGs setiap tahunnya. Anomali peningkatan anggaran secara signifikan dikarenakan adanya kebijakan darurat pandemi Covid 19, dimana setiap kementerian berhak mengajukan anggaran secara langsung kepada Kemenkeu dan melakukan pergeseran anggaran antar unit, organisasi dan program tanpa melalui pengesahan oleh legislatif setelah APBN disahkan. Hal ini berdampak pada adanya perbedaan nominal yang tertulis dalam APBN awal dan anggaran kementerian. Brief ini menggunakan data anggaran kementerian (PAGU DIPA) untuk data tahun 2020.

18



Gambar 3: Deviasi anggaran berdasarkan sektor selama periode tahun 2017-2020

5. Diskusi terkait dampak Pandemi Covid 19 terhadap SDGs dan pengangguran pemerintah

Sebagian besar studi sepakat bahwa pandemi telah menghambat pencapaian SDGs di Indonesia pada hampir semua tujuan SDGs. Paramashanti (2021) mendiskusikan dampak terhadap tujuan 2: Tanpa kelaparan dan Tujuan ketahanan pangan, yaitu adanya ancaman kelaparan dan malnutrisi terutama stunting.¹⁹ Safitri et al (2021) menyatakan bahwa dari empat pilar SDGs di Indonesia²⁰ pilar ekonomi dan sosial adalah paling terpengaruh karena berdampak pada tiga tujuan; tujuan 1 (tanpa kemiskinan), Tujuan 8 (Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi), dan tujuan 3 (Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia). Sebagai tambahan, A. H. Halimatussadiah et al., (2020) menyatakan bahwa resiko ekonomi dan sosial akan bertambah termasuk terganggunya supply makanan, meningkatnya angka kemiskinan, sampah dan limbah rumah sakit, meningkatnya angka pengangguran, polusi udara, kesenjangan sosial, kekurangan supply air, kesehatan mental dan meningkatnya intensitas serta keparahan bencana terkait iklim. Novita (2021) menekankan bagaimana angka pengangguran bertambah 3.7 juta orang dan sektor Kesehatan dan ekonomi sangat terpengaruh sehingga menyebabkan disrupsi di hampir semua pencapaian SDGs²¹ dengan kadar dampak yang berbeda.²² World Bank menyatakan bahwa tanpa adanya intervensi darurat seperti bantuan sosial maka 5.5 – 8 juta masyarakat Indonesia akan masuk dalam kategori miskin, hal ini menyanggah upaya Indonesia selama tujuh tahun dalam mengurangi angka kemiskinan.²³

Pemerintah Indonesia telah menerapkan upaya kebijakan keuangan dan fiskal sebagai langkah awal untuk mengatasi krisis Covid 19 dengan menerapkan refocusing dan realokasi anggaran dan memberikan stimulus dalam tiga tahap. Pada bulan Maret 2020, Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk.²⁴ Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diikuti oleh pembelian dan pemberian vaksin secara gratis secara masal. Pemerintah Indonesia juga merilis respon gawat darurat untuk menanggulangi kemungkinan pertumbuhan ekonomi menurun sampai -5%. PEN diluncurkan dengan anggaran awal Rp405 triliun yang meningkat menjadi Rp 695 triliun dengan fokus stimulus ketiga adalah Kesehatan dan PEN dengan porsi perlindungan sosial 33,5 persen (Gambar 5).

¹⁹ Sumber: <https://www.journal.fkm.ui.ac.id/kesmas/article/view/3934>

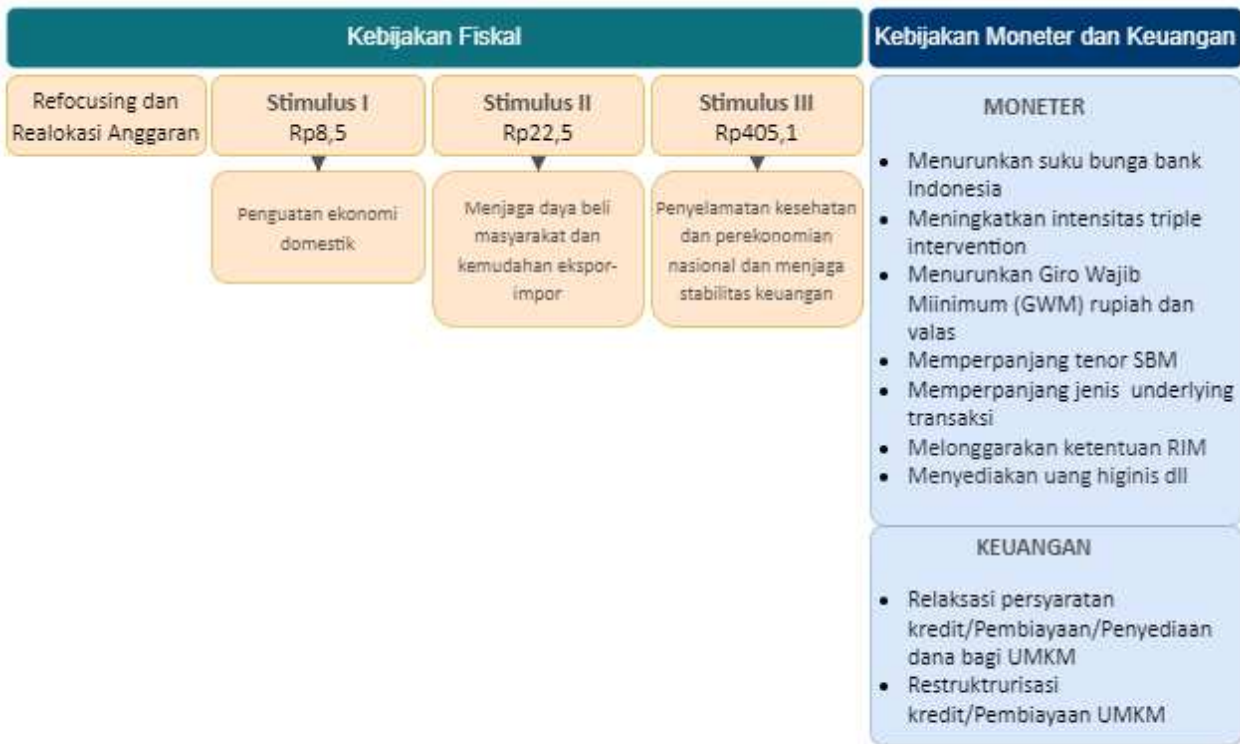
²⁰ Pemerintah Indonesia telah membagi TPB kedalam 4 pilar pembangunan: Semua Target dan tujuan SDG/TPB terbagi menjadi empat pilar, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola.

²¹ Sumber: <https://tpb.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Thinking-Ahead-Indonesia%E2%80%99s-Agenda-on-Sustainable-Recovery-from-COVID-19-Pandemic.pdf>

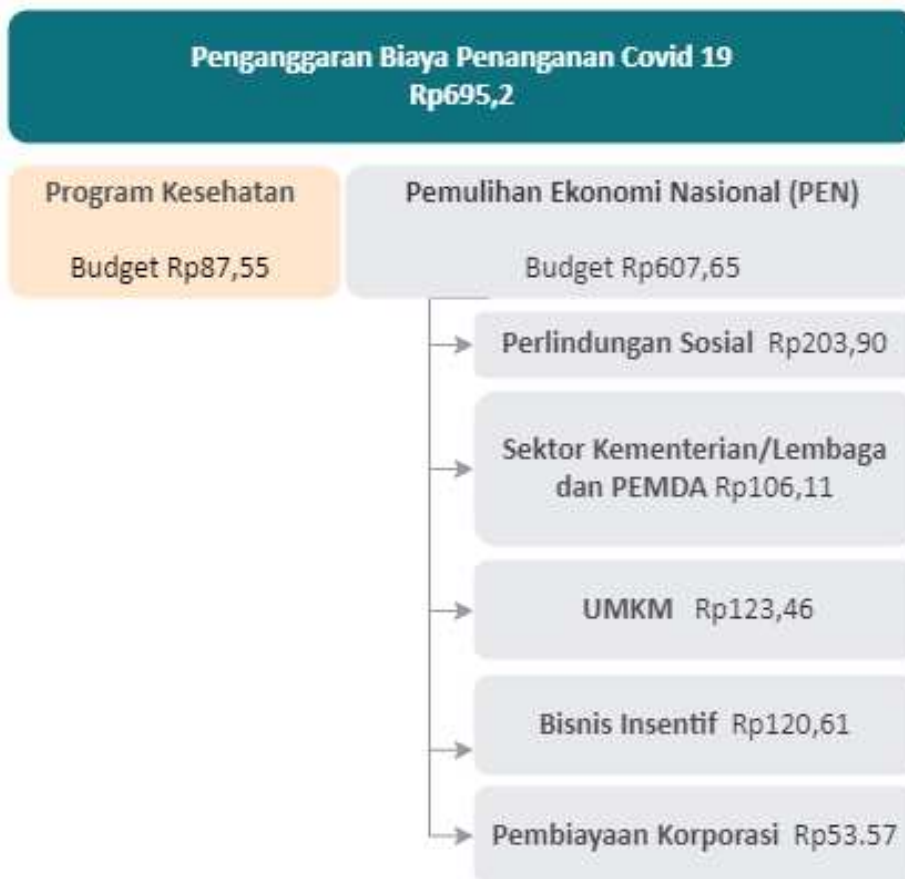
²² Sumber: Journal "COVID-19 Impact on TPB and the Fiscal Measures: Case of Indonesia", source: <https://doi.org/10.3390/ijerph18062911>

²³ Sumber: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/987911604465487663/pdf/Indonesia-COVID-19-Observatory-Ex-ante-Poverty-and-Distributional-Impacts-of-COVID-19-in-Indonesia.pdf>

²⁴ Sumber: <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/responkebijakan>



Gambar 4: Kebijakan Fiskal dan Moneter selama masa Pandemi <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/tantanganCovid>



Gambar 5: Biaya penanganan Covid 19 (dalam triliun rupiah)

Kertas kebijakan yang dirilis oleh International Budget Partnership (IBP) menyatakan bahwa selain kesehatan dan ekonomi yang merupakan fokus utama PC-PEN,²⁵ pandemi juga berdampak pada sektor lainnya seperti pendidikan, sosial, politik, transportasi dan aspek hukum/legal yang membutuhkan intervensi kebijakan fiskal yang terpisah. Salah satu temuan dari brief ini adalah rendahnya serapan anggaran pemerintah dalam PC-PEN yang hanya mencapai 83 persen dari pagu Rp 695 triliun di akhir tahun 2020. Rendahnya serapan ini sebagian besar dikarenakan rendahnya serapan kluster insentif UKM (47 persen) dan kluster kesehatan (64 persen).

Untuk mengatasi dampak pandemi terhadap pencapaian SDGs pemerintah telah menyusun RAN SDGs 2021-2024 yang memuat strategi untuk mencapai target SDGs pasca Pandemi Covid 19. Strategi ini memuat kebijakan sosial, ekonomi, legal dan governance. Namun, Novita (2021) berargumen bahwa rencana aksi ini perlu lebih komprehensif dan efektivitas dari kebijakan dan program program yang dicanangkan perlu dimonitor dan dipelajari. Kebijakan pemerintah ini perlu melibatkan banyak pihak untuk memastikan terjadinya keselarasan antara kebijakan dan implementasinya.

²⁵ PC-PEN: Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

6. Diskusi Gender didalam anggaran pemerintah

Menurut perpres SDGs 59/2017 institusi pemerintah yang bertanggung jawab mengemban pelaksanaan SDGs no 5 terdiri dari 8 kementerian, yaitu: (Kementerian Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementrian tenaga kerja, kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Kesehatan). Didalam brief ini hanya dimasukan dua kementerian dari total 8 kementerian untuk menghindari tumpang tindih perhitungan data anggaran. Saat ini tidak terdapat informasi publik yang memberikan gambaran alokasi gender dalam anggaran pemerintah, terutama SDGs. Untuk dapat mengetahui dampak dari kontribusi setiap kementerian kedalam pencapaian goal lima ini diperlukan penelaahan anggaran secara lebih mendetail.

Mandat untuk melaksanakan pengarus utamaan gender (PUG) oleh pemerintah pusat (kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah diatur oleh Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan lain diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) yang diatur oleh Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. BAPPENAS juga telah mengeluarkan mekanisme penandaan Anggaran Responsive Gender (ARG),²⁶ dimana disebutkan bahwa Penandaan anggaran responsif gender yang tercakup di dalam buku pedoman ini hanya dilakukan pada belanja K/L dalam APBN, tidak termasuk Belanja Non-K/L, Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mekanisme penandaan ini juga diatur secara mendetail oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119 / PMK.02 / 2009 terkait petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian dan Lembaga. PMK ini menyatakan adanya kewajiban K/L untuk menyusun Gender Pathway Analysis (GPA) dan Gender Budget Statement (GBS). GBS adalah dokumen yang wajib disertakan dalam proses input di sistem informasi KRISNA.²⁷ Sampai saat ini KRISNA belum dapat diakses oleh publik begitupun GBS. Dalam penganggaran tematik gender responsive budget (GRB) memiliki kode budget khusus 003, aturan kodifikasi anggaran ini sebenarnya memudahkan proses ARG²⁸ di pemerintah, terutama di Kementerian dan Lembaga untuk dapat melakukan tracking anggaran gender yang dapat mendukung SDGS Kesetaraan Gender. Namun dalam VNR Indonesia 2021 dinyatakan bahwa pada aspek transparansi publik gender responsive budget Indonesia masih dalam klasifikasikan sebagai tidak memenuhi harapan (not yet to be fulfilled). Hal ini karena tidak ada mekanisme yang dapat menunjukkan keterbukaan informasi terkait gender kepada publik. Studi PEFA (2020) menyatakan meskipun peraturan dan undang undang terkait GRB sudah ada namun efektivitasnya tidak diketahui, karena tidak ada evaluasi dan assessment dalam implementasinya. Selain itu tidak ada arahan yang jelas untuk menyusun program yang berdampak pada kesetaraan gender, oleh karenanya diperlukan suatu sistem Analisa dan tracking anggaran berbasis gender sehingga dapat mengukur dampaknya terhadap pencapaian SDGs goal lima (Kesetaraan Gender).

²⁶ Sumber: <https://www.bappenas.go.id/files/publikasi-kpapo/Kesetaraan%20Gender%20dan%20Pemberdayaan%20Perempuan%20Pedoman%20Penandaan%20ARG%20KL%20Edisi%20I%202020.pdf>

²⁷ sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) adalah sebuah platform yang mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja yang akuntabel. KRISNA v03 just launched in November 2021 dan direncanakan untuk selesai di tahun 2022 source <https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/2242-perbaikan-krisna-menuju-sistem-perencanaan-dan-penganggaran-yang-paripurna>

²⁸ Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. https://www.bappenas.go.id/files/6513/5027/4523/arg--penyusunan-gbs_20120720144840_0.pdf

7. Analisa keterbatasan data yang disajikan dalam brief

Proses pemilihan kementerian yang bertanggung jawab pada sektor tertentu dipilih dalam brief ini untuk menghindari tumpang tindih perhitungan alokasi budget. Selain itu data yang disajikan merupakan data agregat dan tidak memisahkan berdasarkan jenis belanja dan program, dan hanya berdasarkan budget dari kementerian terpilih. Sehingga data yang disajikan merupakan proksi dari real anggaran yang dipakai untuk pencapaian goal pada sektor SDGs tertentu. Pemilihan klasifikasi berdasarkan organisasi/unit kementerian sebagai kontributor anggaran SDGs dilakukan berdasarkan peraturan presiden no 59/2017 tentang SDGs. Perpres ini secara jelas menyebutkan daftar kementerian yang berkontribusi pada SDGs. Keterbatasan dalam klasifikasikan anggaran berdasarkan fungsi, akan menyulitkan proses pemilihan kontribusi setiap fungsi ke tujuan dan sektor tertentu dalam SDGs. Sebagai contoh dari 11 Anggaran pemerintah berdasarkan fungsi tidak diketahui secara detail fungsi mana yang berkontribusi pada tujuan 5: Gender/Sektor Kesetaraan Gender (Gender equity).

Tabel dibawah menjelaskan proses seleksi pemilihan kementerian yang berkontribusi pada sektor perlindungan sosial (goal 1 dan goal 10). Sektor lain juga menggunakan mekanisme yang sama. Sehingga presentasi data dalam brief ini tidak menunjukkan keseluruhan anggaran pemerintah. Kementerian yang bertanggung jawab untuk setiap tujuan dapat dilihat secara lengkap dalam lampiran 2.

<u>Document Referensi</u>	<u>Kementerian yang berkontribusi</u>	<u>Kementerian yang dipilih untuk berkontribusi ke sektor perlindungan sosial yang disajikan dalam brief ini.</u>
Kementerian Keuangan: Nota Keuangan tentang fungsi Perlindungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Perpres 59/2017 on SDGS	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) • Kementerian Keuangan • Kementerian Pendidikan • Kementerian Sosial • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Kementerian Agama • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat • Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB 	

Tabel 2: Kementerian yang berkontribusi terhadap sektor perlindungan sosial

Dalam dokumen teknis perencanaan SDGs disampaikan proses pelaksanaan SDGs di daerah menggunakan APBD dengan mekanisme integrasi seperti di gambar 1. Pendanaan SDGs di daerah ini tidak dapat terefleksikan dalam brief dikarenakan tidak terdapat dokumen publik yang dapat menunjukkan alokasi anggaran SDGs pada pemerintah daerah. Fungsi pelaporan pencapaian SDGs adalah tugas dari pemerintah propinsi, dan tidak terdapat informasi secara detail, apakah kontribusi SDGs pada level kabupaten/kota dapat terefleksikan dalam laporan pemerintah propinsi tersebut.

8. Kesimpulan dan Rekomendasi

Indonesia telah berupaya penuh dalam mencapai target SDGs dengan proses penyalarsan target SDGs kedalam program pembangunan dalam bentuk rencana aksi di tingkat nasional dan daerah. Saat ini Indonesia menduduki rangking 97 dari 165 dalam indeks SDGs. Namun sulit mendapatkan data anggaran yang cukup detail untuk memberikan gambaran total anggaran yang digunakan untuk pencapaian SDGs, dikarenakan tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi anggaran SDGs. Mengingat keterbatasan penelitian dalam brief ini, maka tidak dapat disimpulkan adanya hubungan langsung antara upaya pencapaian prioritas target SDGs dan kredibilitas anggaran. Tren anggaran dalam brief ini menunjukkan adanya persoalan kredibilitas anggaran pada hampir disemua sektor, terutama overspending cukup tinggi pada sektor lingkungan hidup di tahun 2018 dan 2019 secara berturut turut dengan nilai stagnan dalam indeks performance SDGs. Untuk mengetahui kaitan kredibilitas anggaran terhadap dampak pencapaian SDGs memerlukan penelaahan atau tracking anggaran dan evaluasi indikator capaian program dengan lebih rinci dan menggunakan metode monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan secara berkala.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat meningkatkan performa kredibilitas anggaran SDGs adalah:

1. Pemerintah perlu menyusun suatu model monitoring dan evaluasi kredibilitas anggaran yang berkontribusi pada pencapaian SDGs hal ini bertujuan untuk memastikan ketepatan pemanfaatan anggaran dalam mempercepat prioritas Tujuan tertentu dalam SDGs. Serta memastikan hasil monitoring dan evaluasi anggaran ini dapat diakses oleh publik hal ini bertujuan untuk memastikan pengarusutamaan SDGs disetiap level pemerintahan dan memastikan upaya pembangunan yang inklusif dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
2. Memaksimalkan fungsi BPK sebagai entitas mandiri untuk mengawasi pelaksanaan SDGs termasuk didalamnya melakukan monitoring dan evaluasi serta verifikasi kredibilitas anggaran SDGs. Seperti telah disebutkan dalam VNR 2019 dan VNR 2021 saat ini BPK telah melakukan audit SDGs namun hanya pada proses perencanaan dan bukan pelaksanaannya.
3. Pemerintah Indonesia perlu memastikan upaya mitigasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang memiliki resiko tinggi dikarenakan situasi pandemi dan memiliki SDGs Indeks Tren Stagnan dan memiliki tantangan besar (major challenges remain). Upaya ini perlu mempertimbangan kebutuhan dan penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan yang tepat sasaran dan termonitor.
4. Indonesia telah memiliki perangkat regulasi dan aturan terkait gender, namun dikarenakan tidak ada monitoring dan kajian tentang bagaimana perangkat ini diterapkan dan dijalankan, sehingga sangat sulit melihat dampaknya terhadap peningkatan aspek kesetaraan gender. Pemerintah disarankan untuk memastikan perangkat aturan ini dijalankan oleh kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran berbasis gender yang akuntabel.
5. Pemerintah Indonesia memastikan keberlanjutan dari platform bentukan pemerintah dan mitra pembangunan (SDGs Financing HUB, SDGs one) untuk memaksimalkan pendanaan dan memperkuat proses monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja SDGs.

9. Daftar Pustaka

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). PERFORMANCE AUDIT REPORT OF THE PREPAREDNESS FOR IMPLEMENTATION OF SDGs IN INDONESIA. BPK RI.

https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/focus_areas/SDGS_and_SAls/sai_preparedness_audits/SDGS_2019_Indonesia_prep_EN.pdf

Halimatussadiyah, A. (2020). Mainstreaming the Sustainable Development Goals into national planning, budgetary and financing processes: Indonesian experience (1st ed.) [E-book]. UNESCAP Economic and Social Commission for Asia and The Pasific.

Halimatussadiyah, A. H., Cesarina, A., Amanda Siregar, A., Rahardi, F., Hanum, C., Wisana, D., Sofiyandi, Y., al Kautsar Anky, W., Riefky, T., Hambali, S., Kurniawan, R., Sabrina, S., Wisana, D., Rahardi, F., Bintara, H., F. Rezki, J., Husna, M., Azar, M. S., Anabil, N., Reksa Samudra, R. (2020, December). Thinking Ahead: Indonesia's Agenda on Sustainable Recovery from COVID-19 Pandemic. Institute for Economic and Social Research and Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

<https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Thinking-Ahead-Indonesia%E2%80%99s-Agenda-on-Sustainable-Recovery-from-COVID-19-Pandemic.pdf>

James Sinaga, E. (2016). ANALISIS RENDAHNYA PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L) DAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 261–274. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i2.144>

National Planning Agency Indonesia. (2020). TPB Dashboard Indonesia. TPB Dashboard Indonesia. Retrieved July 29, 2021, from <http://TPB.bappenas.go.id/dashboard/#!/pages/landingPage.html>

Novita, A. A. (2021). Maintaining the TPB Target During Pandemic COVID 19. Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020). <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210928.109>

Olsen, S. H., Elder, M., Akenji, L., Bengtsson, M., & King, P. (2018, March). Scoring the Sustainable Development Goals: Pathways for Asia and the Pacific. Institute for Global Environmental Strategies (IGES). <http://re.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/Scoring%20the%20Sustainable%20Development%20Goals.pdf>

P Hadi, S., Mohd Ibrahim, H., Bulan, P., & Suryoko, S. (2020). Pandemic, TPB, and CSR: Case Study of Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 202, 03007. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020203007>

PEFA. (2020, June). PEFA ASSESMENT OF GENDER RESPONSIVE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT. <https://www.pefa.org/sites/pefa/files/2021-07/ID-Jun20-GRP-FM-Public%20with%20PEFA%20Check.pdf>

Putri, C. A. (2021, November 23). Sri Mulyani Sentil Kepala Daerah, Uang Rakyat Malah Ditahan! CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211123153210-4-293779/sri-mulyani-sentil-kepala-daerah-uang-rakyat-malah-ditahan>

Safitri, Y., Ningsih, R. D., Agustianingsih, D. P., Sukhwani, V., Kato, A., & Shaw, R. (2021). COVID-19 Impact on TPB and the Fiscal Measures: Case of Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(6), 2911. <https://doi.org/10.3390/ijerph18062911>

Seknas FITRA. (2013, April). Reformasi Penganggaran di Indonesia. <https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2013/04/REFORMASI-PENGANGGARAN-DI-INDONESIA-budget-brief.pdf>

Suryahadi, A., al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175–192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>

Yulia Putri, S. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) PADA KASUS STUNTING DI INDONESIA. *Jurnal Power in Internal Relation*, 5(2). <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index>

10. Lampiran

Lampiran 1:

Sector	Related SDG Goal(s)	Administrative Classification	Approved Budget (National Currency billion rupiah)				Actual Spending (National Currency, Units)				Deviation, by Sector (%)				Sector Share of Total Spending (%)			
			2017	2018	2019	2020-PAGU DIPA	2017	2018	2019	2020- PAGU DIPA	2017	2018	2019	2020- PAGU DIPA	2017	2018	2019	2020- PAGU DIPA
Agriculture and Food	Goal 2	Ministry of Agriculture (MoA)	24146.4	23,820.8	21,686.5	15,886.2	21910.6	21,836.6	19,424.3	15,188.7	-10%	-10%	-11%	-8%	2%	2%	2%	1%
		Ministry of Agrarian affairs and Spatial Planning	6607.6	9,065.9	9,669.3	8269.6	5707.6	7,886.5	8,509.2	6,925.7								
Education	Goal 4	Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia	37965.07	40,092.0	35,993.1	86,386	36865.4	39,432.4	36,494.7	79,061.8	-4%	2%	6%	-9%	6%	6%	5%	4%
		Ministry of Research, Technology and Higher Education Indonesia	39487.6	41,284.0	41,264.1	1977.5	37780.3	43,238.0	45,499.0	1,766.3								
Environment	Goal 13	The National Disaster Management Agency	1887.4	749.4	619.4	12713.4	2644.4	7,104.7	8,079.9	11,757.6								
	Goal 14	Coordinating Ministry for Maritime and investment affairs	300.5	300.3	254.2	259.5	262.2	273.9	595.6	244.4	-16%	26%	46%	-7%	1%	1%	2%	1%
		Ministry of Fisheries and Marine Affairs (MoFMA)	9138.3	7,287.6	5,483.0	5269.8	6111.4	6,097.4	5,055.1	4,809.9								
Goal 15	Ministry of Environment and Forestry	6463.3	8,025.6	9,076.5	7658.8	5871.7	7,180.9	8,843.0	7,196.2									
Gender Equity	Goal 5	The Ministry of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia	503	553.8	493.6	203.4	486.6	516.9	480.2	199.5	-7%	-8%	-5%	-1%	0.1%	0.1%	0.1%	2%
		Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises	960.7	944.5	961.4	29474.6	880.7	858.5	904.7	29,256.4								
Health	Goal 3	Ministry of Health	55863.5	59,097.7	58,746.5	107033.6	54912.3	57,348.7	67,279.3	102,207.4	-2%	-3%	15%	-5%	4%	4%	4%	6%
Social Protection	Goal 1 and 10	Ministry of Social affairs	17318.9	41,295.7	58,906.5	134,171.8	17164.6	41,234.1	57,726.6	130,288.4	-3%	1%	-1%	-3%	2%	3%	4%	7%
		Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions And Transmigration	4673.3	5,145.3	4,325.6	2564.7	4,182.3	5,460.7	5,165.8	2,451.2								
Water and Sanitation	Goal 6	Ministry of Public Works & Housing	104237.8	107,386.3	110,731.6	107159	96103.3	102,483.6	100,557.5	100,793.1	-8%	-5%	-9%	-6%	8%	7%	7%	5%

Sumber data : Sumber data adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017, 2018, 2019 dan Nota Keuangan. Semua dokumen dapat diakses melalui tautan berikut:

LKPP 2017 <https://www.kemenkeu.go.id/media/10117/lkpp-2017.pdf>

<https://drive.google.com/file/d/1cpyVn2uxDSYdbTnCFThFkYOHdLHlPDnk/view>

LKPP 2019 <https://www.kemenkeu.go.id/media/15858/lkpp-2019.pdf>

<https://www.kemenkeu.go.id/media/15868/buku-ii-nota-keuangan-beserta-rapbn-ta-2021.pdf>

<https://www.kemenkeu.go.id/media/18103/lkpp-2020.pdf>

<https://www.kemenkeu.go.id/media/18907/buku-ii-nota-keuangan-beserta-rapbn-ta-2022.pdf>

Nota Keuangan 2020,

<https://www.kemenkeu.go.id/media/18313/buku-ii-nota-keuangan-beserta-rapbn-ta-2022.pdf>

<https://www.kemenkeu.go.id/media/15858/lkpp-2019.pdf>

Nota Keuangan 2020,

<https://www.kemenkeu.go.id/media/18313/buku-ii-nota-keuangan-beserta-rapbn-ta-2022.pdf>

<https://www.kemenkeu.go.id/media/18103/lkpp-2020.pdf>

Lampiran 2:

Sektor	Tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan	Kementerian, Program atau Fungsi (Peraturan presiden No 59 /2017 tentang SDGs).
Pertanian dan Bahan Pangan	Goal 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) • Kementerian Keuangan • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Kesehatan (MoH) • Kementerian Pertanian (MoA) • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat • Kementerian Lingkungan dan Kehutanan • Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Pendidikan	Goal 4	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) • Kementerian Keuangan • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Kementerian Agama • Kementerian Riset, teknologi dan pendidikan tinggi
Lingkungan	Goal 13	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Keuangan • Kementerian Dalam Negeri • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) • Kementerian Lingkungan dan Kehutanan
	Goal 14	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) • Kementerian Keuangan • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Lingkungan dan Kehutanan • Kementerian Dalam Negeri

	<p>Goal 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) • Kementerian Keuangan • Kementerian Lingkungan dan Kehutanan • Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat • Kementerian Pertanian • Kementerian Kelautan dan Perikanan
<p>Gender</p>	<p>Goal 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Keuangan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; • Kementerian Tenaga Kerja • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah • Kementerian Kesehatan
<p>Kesehatan</p>	<p>Goal 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) • Kementerian Keuangan • Kementerian Kesehatan • Kementerian Perdagangan • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Kementerian tenaga Kerja • Kementerian Transportasi • Kementerian Perindustrian • Kementerian Sosial • Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI
	<p>Goal 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) • Kementerian Keuangan • Kementerian Sosial • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Kementerian Agama • Kementerian Kesehatan • Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB

		<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat
Air bersih dan Sanitasi	Goal 10	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) • Kementerian Keuangan • Kementerian Sosial • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Agama • Badan Pusat Statistik • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Luar Negeri • Kementerian tenaga kerja
	Goal 6	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) • Kementerian Keuangan • Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat • Kementerian Kesehatan • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI • Kementerian Perindustrian • Kementerian Lingkungan dan Kehutanan • Kementerian Pertanian